

ABSTRAK

Sistem pemerintahan di Indonesia menerapkan apa yang disebut dengan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Adanya praktik ini mengakibatkan tiap Daerah memiliki kekuasaan dengan taraf tertentu dalam mengatur kekayaan yang dimilikinya, termasuk di antaranya ialah barang milik daerah (BMD). Adapun BMD umumnya berbentuk aset tetap—menjadikannya salah satu pilar utama dalam memfasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan juga pelaksanaan pelayanan masyarakat di Daerah. Meskipun memiliki peran yang vital, hingga kini problem terkait pengelolaan BMD masih terus bermunculan di berbagai titik di Indonesia. Terkait hal ini, Penulis berpendapat bahwa adanya implementasi suatu sistem pengelolaan BMD dapat membantu meminimalisir risiko terjadinya permasalahan terkait pengelolaan BMD. Selain itu, adanya sistem pengelolaan BMD juga dapat dijadikan sebagai alat untuk menjaga akuntabilitas akuntansi pemerintahan daerah. Berangkat dari opini Penulis tersebut, Penulis berusaha untuk mencari tahu apakah DPKD Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan salah satu Perangkat Daerah telah menerapkan suatu sistem pengelolaan BMD yang memadai untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan—khususnya terkait aset tetap—di Daerah. Setelah melakukan studi pustaka, penelitian terhadap peraturan perundang-undangan terkait, serta wawancara kepada pihak yang bersangkutan, Penulis menyimpulkan bahwa DPKD Provinsi Kalimantan Timur telah menerapkan sistem pengelolaan aset tetap bernama SIMDA BMD yang cukup memadai dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta teori yang berlaku secara umum.

Kata kunci: BMD, aset tetap, sistem pengelolaan, DPKD Provinsi Kalimantan Timur

ABSTRACT

Indonesian government system implements what is known as regional autonomy and fiscal decentralization. This practice enables each Region to have a certain level of control over its wealth management, which includes BMD (local-owned assets). BMD generally comes in the form of fixed assets—making it one of the main pillars in facilitating government operational matters and public service in the Regions. Albeit its vital role, problems regarding BMD management keep on budding in numerous points in Indonesia even now. Regarding this concern, the Writer thinks that an implementation of BMD management system can help minimize the risk of cases related to BMD management from happening. Furthermore, BMD management system can also be utilized as a means to maintain the accountability of local government accounting. Adhering to this point of view, the Writer tries to find out whether DPKD Provinsi Kalimantan Timur (Regional Library and Archive Office of East Kalimantan Province) which is one of the Local Government agencies has implemented a proper BMD management system that can ensure fiscal management accountability—especially one that is apropos of fixed assets—in the Region. After conducting library research, perusing related legislations, and interviewing appertained personnel, the Writer concludes that DPKD Provinsi Kalimantan Timur has implemented a fairly adequate fixed assets management system named SIMDA BMD that’s also in line with current legislation and commonly accepted theories.

Keywords: *local-owned assets (BMD), fixed assets, management system, Regional Library and Archive Office of East Kalimantan Province (DPKD Provinsi Kalimantan Timur)*